

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **4.1 Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian, hipotesis bahwa Interpol memberikan peran dalam upaya pemberantasan obat-obatan palsu di Indonesia dengan cara memberikan sebuah wadah kerja sama bagi Pemerintah Indonesia, terbukti. Neoliberal institusional menjelaskan terdapat enam ekspektasi peran dan fungsi organisasi internasional, yakni (1) organisasi internasional mendukung interaksi antar negara serta sebagai pengelola hal substansif; (2) organisasi internasional berfungsi sebagai pembentuk resolusi; (3) organisasi internasional sebagai inisiator kerja sama; (4) organisasi internasional sebagai konsekuensi jangka panjang; (5) memodifikasi karakter dalam sistem internasional; (6) *pooling*; (7) penyedia informasi terpercaya.

Dengan menggelar sidang umum setiap tahunnya yang diikuti oleh seluruh negara anggotanya serta di dalamnya membahas berbagai isu, Interpol telah menjalankan fungsinya sebagai organisasi internasional yang mewadahi interaksi antar negara serta sebagai pengelola hal substansif. Sidang umum yang digelar setiap tahunnya memberikan *output* berupa sebuah resolusi yang di terbitkan di akhir pertemuan. Dalam hal pemberantasan obat-obatan palsu, di tahun 2008 dan 2010 Interpol telah mengeluarkan resolusi khusus sebagai bentuk perhatian Interpol terhadap isu tersebut. Resolusi yang di terbitkan bukan hanya sekedar bentuk normatif saja namun juga dilakukan tindakan secara nyata untuk menindak lanjutinya. Sebagai organisasi kepolisian terbesar di dunia, Interpol memobilisasi

para penegak hukum serta lintas sektor dari seluruh dunia untuk bersama menanggulangi permasalahan peredaran obat-obatan palsu. Digelarnya operasi bersama yang salah satunya adalah Operasi Pangea, Interpol telah melakukan sebuah tindakannya sebagai konsekuensi jangka panjang dari resolusi yang di terbitkan sebelumnya dan juga menjalankan perannya sebagai inisiator kerja sama.

Operasi Pangea yang dikoordinir oleh Interpol membawa dampak tersendiri bagi negara-negara yang turut serta di dalamnya, termasuk Indonesia. Fenomena peredaran obat-obatan palsu di Indonesia sudah marak terjadi khususnya pada metode penjualan konvensional. Dalam upaya pemberantasannya pun ditemui berbagai kendala seperti permasalahan ego sektoral, tumpang tindih regulasi, keterbatasan wewenang, bahkan terkadang yang terjadi adalah lempar tanggung jawab. Kekhawatiran akan peredaran obat-obatan palsu di Indonesia pun bertambah seiring perkembangan teknologi yang berimplikasi pada modus baru peredaran obat-obatan palsu dimana salah satunya melalui penjualan secara *online*. Indonesia pun perlu untuk mengembangkan metode pemberantasannya mengikuti tren yang sedang berkembang. Disinilah Interpol hadir dengan Operasi Pangeanya sebagai alat untuk mencapai kepentingan nasional Pemerintah Indonesia.

Interpol melalui Operasi Pangea yang melibatkan lintas sektor antar *stakeholder* domestik dalam pelaksanaannya mempromosikan metode baru dalam pemberantasan obat-obatan palsu di Indonesia. Sebelumnya *stakeholder* di Indonesia dalam pelaksanaan upaya pemberantasan obat-obatan palsu kurang terkoordinir dan berjalan masing-masing. Dengan mengikuti Operasi Pangea yang dikoordinir Interpol, tentunya Pemerintah Indonesia perlu membentuk sebuah wadah terlebih dahulu bagi *stakeholder* terkait di Indonesia sebagai persiapan untuk

ikut serta dalam Operasi Pangea. Sebagai hasilnya adalah terbentuknya Satgas Pemberantasan Obat dan Makanan Ilegal yang berisi kerja sama lintas sektor antar *stakeholder* di Indonesia terkait pemberantasan obat-obatan palsu. Dilaksanakannya Operasi Pangea di Indonesia menciptakan sebuah harmonisasi antar *stakeholder* yang sebelumnya kurang terkoordinir karena terdapat ego sektoral, tumpang tindih regulasi, keterbatasan wewenang, saling lempar tanggung jawab, dapat di minimalisir. Metode pemberantasan obat-obatan palsu pun turut berkembang dimana Sebelumnya upaya pemberantasan obat-obatan palsu hanya terpaku pada penjualan konvensional (melalui pasar, warung, toko obat, apotek) kini berkembang juga menasar pada penjualan melalui media internet (*online*), dimana ini merupakan hal baru dalam upaya pemberantasan obat palsu yang dilakukan oleh Pemerintah Indonesia dan belum pernah dilakukan sebelumnya.

Dengan demikian Interpol telah mampu mengubah dan mengembangkan metode pemberantasan obat-obatan palsu di Indonesia. Selain itu, di samping menciptakan wadah kerja sama lintas sektoral, Interpol juga memberikan sarana berupa pertukaran informasi yang bersifat netral dan terpercaya melalui sistem I-24/7 yang dapat diakses oleh negara anggotanya setiap saat. Hal tersebut memudahkan dalam melakukan upaya pemberantasan obat-obatan palsu karena arus pertukaran informasi terkait obat-obatan palsu dapat berlangsung secara cepat tanpa hambatan.

## **4.2 Saran**

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka secara umum saran dapat diberikan kepada pihak Interpol supaya dapat melakukan penyempurnaan Operasi Pangea

mengingat peredaran Obat Palsu melalui *online* makin marak terjadi dari sisi metode dan teknik operasi terutama di bidang kejahatan siber. Kemudian saran untuk Pemerintah Indonesia termasuk para *stakeholder* pemberantasan pemberantasan obat-obatan palsu adalah untuk lebih erat melakukan sinergitas dalam upaya pemberantasan obat-obatan palsu di Indonesia untuk memastikan kesediaan farmasi yang baik bagi masyarakat Indonesia. Pemerintah Indonesia sebaiknya melakukan pembenahan kembali struktur Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) selaku garda terdepan dalam pemberantasan obat-obatan palsu di Indonesia. Restrukturisasi harus dilakukan secara menyeluruh dari berbagai aspek yang berkaitan dengan penguatan salah satu caranya adalah dengan meningkatkan wewenang penyidik BPOM. Diketahui bahwa saat ini mereka hanya dapat menjalankan fungsi pengawasan dan pencatatan, tidak bisa melakukan penuntutan, penggeledahan, penangkapan dan penahanan tersangka.

Sedangkan dari sisi akademis, saran yang dapat diberikan bagi penelitian selanjutnya adalah untuk menggali lebih dalam bagaimana efektivitas dari program Interpol dalam upaya pemberantasan obat-obatan palsu di Indonesia, karena penelitian ini hanya terbatas dalam menjelaskan peran Interpol saja dan tidak membicarakan mengenai efektivitas dari implementasinya.